



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



Draft Rencana Kerja(RENJA 2022)

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di susun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang di laksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025. Lebih lanjut isi dari Renja ini adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai program dan kegiatan serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan di masa-masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan rencana kerja ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 22 Maret 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kepala,



Hj. Aji Lina Rodiah, SE
NIP. 19650325 198503 2 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar isi.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA –PD TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	31
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD	49
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2. Tujuan dan Sasaran	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	56
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	56
BAB V PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang di lakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah secara sistematis terarah terpadu menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan yang berjangka panjang, menengah dan jangka pendek, sebagaimana di amanatkan dalam UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah harus menyusun rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah juga melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana penyelenggaraan Tata Pemerintah melakukan Pengintegrasian Gender melalui kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 di mana Renja merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1(satu) tahunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam Rencana Kerja memuat visi misi tujuan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan di capai selama kurun waktu 1 tahun .

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024 diamanatkan lima misi pembangunan Kutai Kartanegara, yaitu : pada misi ke dua

yaitu “MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DAN BERBUDAYA “

Dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2024 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai OPD pendukung yang juga mempunyai tanggungjawab terhadap terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Terdapat beberapa persoalan-persoalan pembangunan yang telah dirumuskan dan harus segera diatasi yaitu belum optimalnya peranan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (kesetaraan gender). Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam misi ke tujuh RPJMD pembangunan tersebut.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun pelaksanaan Penyusunan Rencana (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 memperhatikan kepada peraturan Perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Renja dan arah garis kebijakan terkait yang di rumuskan antara lain :

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 19) Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12-197/BAPP/IV.2/065.11/02/2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah :

1. Untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2024.
2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

- 1 Menciptakan keterpaduan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi Misi Pemerintah Daerah.
- 2 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
- 3 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan Operasional Tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.
- 4 Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA -PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja –PD Tahun lalu dan Capaian Renstra

Proses Penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut, hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja (RENJA) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan, Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai

dengan tahun berjalan. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan Renja sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2021 rencana Kerja Dinas PP dan PA dengan indikator yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran Renstra OPD pada tahun tersebut sebanyak 10 Program terdiri dari 4 program Generik dengan Outcome yang ingin dicapai sebanyak 7 indikator Outcome dan 6 program wajib dengan Outcome yang ingin dicapai sebanyak 7 indikator Outcome dengan pagu program kegiatan yang direncanakan sebesar Rp.5.463.408.000

Adapun realisasi Tahun 2020 dari rencana pada renja dibanding realisasi tahun sebelumnya yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan cakupan layanan administrasi perkantoran mencapai 100%;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Persentase sarana dan prasarana kantor mencapai 81%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Indikator Rata-Rata Nilai Kinerja SKP tercapai 85,50%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi indikator Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA mencapai 100%, Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit realisasi mencapai 73,56%, dan Indikator Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset realisasi mencapai 100%

5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan Indikator Persentase OPD yang Melaksanakan ARG 68,96% dan Persentase PD yang memiliki data gender 86,21%.
6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan indikator Persentase perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif 25,40%.
7. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan indikator Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO 99,12%, Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif 16,03%
8. Program Pemenuhan hak - hak anak dengan indikator Kecamatan Layak Anak 66,67%.
9. Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan indikator Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan ditargetkan 8.84%.

Sedangkan pada tahun 2020 terjadi kenaikan dari tahun 2019 anggaran dikelola oleh dinas PP dan PA sebesar 22,89% sehingga akan berpengaruh terhadap capaian indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Program yang akan ditargetkan sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan Indikator Persentase OPD yang Persentase OPD yang melaksanakan ARG 89,66%, Persentase PD yang memiliki Data Gender 89,66%.
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan indikator Persentase perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif 26.24%.
3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan indikator Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO 100%, Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif 23,63%
4. Program Pemenuhan hak - hak anak dengan indikator Kecamatan Layak Anak 66,7%.

5. Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan indikator Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan ditargetkan 8.84%

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021
Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

KODE	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan S/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu			Target Program dan Kegiatan Renja 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan 2021	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja 2020	Tingkat Realisasi%		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	93,10	89,66	89,66	89,66	89,66		89,66	89,66
	Rapat Koordinasi PP dan PA	Jumlah Peserta	950	686	116	64	55,17	100	850	89,47
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi	83	53	4	2	50,00	1	56	67,47
	Workshop Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Jumlah peserta workshop PPRG	600	400	200	100	50,00	100	600	100,00
		Persentase PD yang memiliki Data Gender	93,10	89,66	89,66	86,21	96,16	86,21	89,66	89,66

				Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah Dokumen	1	-	1	1	100,00	-	1	100,00
				Penguatan Pokja PUG	Jumlah OPD yang melaksanakan PUG	58	42	6	6	100,00	6	54	93,10
				Penguatan Kelembagaan PUG dengan Perguruan Tinggi Pusat studi Gender dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelembagaan	40	-	30	30	100,00	10	40	100,00
				Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Jumlah Peserta Mengikuti pengembangan KIE Tentang KKG	1.800	500	100	-	-	-	500	27,78
				Penyusunan Data Terpilah Gender	Jumlah Dokumen	5	3	1	1	100,00	1	5	100,00
				Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Sistem Informasi Data Gender dan Anak	5	2	1	-	-	-	2	40,00
				Fasilitasi Pengembangan Desa Gender	Jumlah Desa Gender yang difasilitasi	50	-	10	-	-	-	0	0,00
				Pembinaan Desa Gender	Jumlah Desa Gender yang di Bina	36	9	10	-	-	-	9	25,00
				Penyusunan Regulasi Desa Gender	Jumlah Dokumen	1	-	1	-	-	-	0	0,00
				Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender	Jumlah kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender	5	-	1	-	-	-	0	0,00

				Pembentukan Gender champions bagi PD	Jumlah orang yang mampu menjadi Gender champion di PD	58	-	1	-	-	-	0	0,00
				Fasilitasi Hasil Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Penilaian Program PP Prusahaan Pembina P2WKSS, RSSI&B, dan GSI/KSI	100	-	1	-	-	-	0	0,00
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan di Lembaga legislatif dan eksekutif	29,99	26,24	26,24	26,24	100,00	26,24	26,24	26,24
				Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik	Jumlah Dokumen		-	-	-	-	-	0	-
				Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Jumlah Peserta	450	200	200	100	50,00	100	400	88,89
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah Peserta	500	-	100	-	-	-	0	0,00
				Peringatan Hari-Hari Besar Perempuan	Jumlah Peringatan	10	5	1	1	100,00	-	6	60,00
				Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan			-	-	-	-	-	0	-
					Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00

					Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak yang difasilitasi	1.000	348	110	131	119,09	348	827	82,70
					Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak	Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak yang difasilitasi	330	220,00	60,00	90,00	150,00	50,00	360	109,09
					Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan Yang ditangani	250	75	50	41	82,00	40	156	62,40
					Fasilitasi Penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Jumlah anak korban kekerasan yang di layani	500	320	100	75	75,00	100	495	99,00
					Sosialisasi masalah sosial anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi di sekolah	1.200	550	100	100	100,00	200	850	70,83
					Pemetaan Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Tentang Perempuan dan Anak	5	3	1	1	100,00	1	5	100,00
					Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Jumlah Tenaga Terlatih dalam Pelayanan dan Pendampingan KTP/KTA	250	100,00	40,00	20,00	50,00	100,00	220	88,00
					Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah peserta Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	500	-	1,00	-	-	-	0	0,00

				Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah peserta sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	500	-	1,00	-	-	-	0	0,00
				Penyediaan Layanan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Pengaduan yang Terlayani	1.000	-	1,00	-	-	-	0	0,00
				Pelatihan pendampingan korban kekerasan anak	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel	100	-	20,00	-	-	-	0	0,00
				Pelatihan SOP dan SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel	100	-	1,00	-	-	-	0	0,00
					Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	32,07	34,18	34,18	23,63	69,14	34,18	92	286,85
				Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dibentuk	76	23	11	8	72,73	20	51	67,11
				Pelatihan dan Pengembangan Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	500	180	100	-	-	180	360	72,00

				Fasilitasi Pelatihan Komunikasi terapis autis (ABK)	Tenaga terapis yang terlatih	100	-	20	-	-	-	0	0,00
				Fasilitasi Forum Peduli ABK	Jumlah Forum Peduli ABK yang terbentuk dikecamatan	19	8	4	2	50,00	8	18	94,74
				Fasilitasi Pusat Pembelajaran keluarga (Puspaga)	Jumlah Keluarga yang terlayani	500	250	100	50	50,00	100	400	80,00
				Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Persentase Kelompok Usaha Perempuan yang dibina	11,19	8,84	8,84	8,84	100,00	8,84	8,84	8,84
				Bimbingan Manajemen Usaha Perempuan	Jumlah Pelaku Usaha Perempuan yang dibina	797	300	200	200	100,00	200	700	87,83
				Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Terlaksananya Pameran Hasil Karya Perempuan dalam Pembangunan	50	2	2	-	-	-	2	4,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100,00	100	100	100
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan informasi	72	48	12	12	100,00	12	72	100,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas	140	84	28	28	100,00	28	140	100,00
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Aparatur	66	33	33	33	100,00	33	99	150,00
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja	330	156	25	25	100,00	25	206	62,42
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	330	198	66	66	100,00	60	324	98,18
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan	6.468	4036	1000	1000	100,00	1000	6036	93,32

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	46.296	27558	1222	1222	100,00	1222	30002	64,80
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	212	117	25	25	100,00	25	167	78,77
				Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan minum	72	48	12	12	100,00	12	72	100,00
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Aparatur	372	180	60	60	100,00	60	300	80,65
				Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer	95	57	19	19	100,00	19	95	100,00
				Fasilitasi Memperingati Hari-hari Besar tertentu (Pameran)	Jumlah Pameran	18	10	10	0	-	8	18	100,00
				Penataan Arsip Internal Perangkat Daerah	Jumlah Arsip yang dikelola	5	3	1	1	100,00	1	5	100,00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	100	100	100	81	81,00	100	100	100,00
				Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	140	84	28	28	100,00	28	140	100,00
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan	93	60	10	10	100,00	10	80	86,02
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	85	85	85	85,50	100,59	85	85	100
				Fasilitasi TIM BEKIAS		100	60	20	0	-	20	80	80,00
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						-			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dasar pembentukan Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) untuk memerangi perdagangan orang membutuhkan penanganan yang komprehensif dan multi sektor, diharapkan pemerintah daerah (Kutai Kartanegara) memiliki kerangka hukum mengenai (PTPPO) dan partisipasi setiap anggota masyarakat termasuk anggota keluarga untuk mengambil langkah pencegahan, untuk data perdagangan orang/trafficking, sebanyak 3 kasus tahun 2017.

Belum tersedianya pemetaan data khusus untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dengan adanya pemetaan kasus kekerasan ini dapat memudahkan dalam hal penanganan dimasing-masing desa /kecamatan

Perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan *trafficking* dan peningkatan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meski telah ada Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di

Polda dan Polres, serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) di daerah, dan penyebaran informasi dan kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2020 berjumlah 131 kasus.

Untuk penanganan Korban Tindak Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu maka perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta penyediaan wadah Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi dalam penanggulangan dan perlindungan Perempuan dan Anak yaitu P2TP2A.

Dilihat dari visi dan misi bupati terpilih untuk RPJMD 2021 – 2024 dengan Misi “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” dan Visi kedua yaitu “Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya” adapun sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak dengan Indikator sebagai berikut sesuai dengan adanya Rencana Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Persentase ARG pada belanja langsung APBD
- Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- Persentase anak korban kekerasan yang ditangani
- Persentase Kabupaten Layak Anak

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam rangka memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 yang terdiri dari 5 jenis pelayanan dan 22 indikator kinerja. Pencapaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi

perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 terhadap target SPM adalah 66,67% atau sebanyak 7 indikator kinerja yang berhasil mencapai target dari 22 indikator kinerja SPM. Rincian pencapaian indikator kinerja terhadap target per jenis pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator , perlu dikembangkan sebuah petunjuk teknis yang akan memberikan pedoman pelaksanaan di setiap layanan dan disertai dengan indikator serta cara perhitungan masing-masing indikator.

1. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator utama: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

Penanganan laporan/pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat diukur melalui indikator penunjang: Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini adalah kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.

Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam SPM ini adalah pelayanan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat/bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana medis kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelayanan kesehatan dimaksud dilakukan di rumah sakit yang memberikan pelayanan terpadu dan juga di puskesmas yang memberikan pelayanan dasar komprehensif. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang:

- a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Cakupan RSUD/RSUD/RS swasta, yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - c. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas;
 - d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di RS.
3. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama:
- a) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
 - b) Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

Pelayanan rehabilitasi sosial yang dimaksud dalam SPM ini adalah : pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat pula diukur melalui indikator penunjang :

- Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih;
 - Cakupan petugas pembimbing rohani yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani.
4. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama :
- Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

Penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang:

- Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian;
- Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta;
- Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA;
- Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender;
- Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, untuk layanan bantuan hukum juga dapat diukur melalui indikator penunjang: Cakupan ketersediaan Petugas Pendamping Hukum atau Advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama:

- Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Khusus untuk pelayanan reintegrasi sosial, juga dapat diukur melalui indikator penunjang:
- Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial.

Dari hasil pembahasan diatas berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mencapai untuk maksimalkan pekayanan OPD DPPPA tahun 2021-2026 memiliki indikator sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan OPD DPPA dapat dilihat dari Tabel 2.2 tentang pencapain kinerja Pelayanan Organisasi Pelayanan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Tabel 2.2 tentang
Pencapaian kinerja Pelayanan Organisasi Pelayanan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
1	2	3	4	5					6					7	
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	25,50	25,50	25,50	26,50	28,50	29,50	30,50	25,50	26,50	28,50	29,50	30,50	100,00	100,00
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	0,015	0,015	0,015	0,023	0,031	0,039	0,046	0,015	0,023	0,031	0,039	0,046	100,00	100,00
3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,21	0,21	0,21	0,25	0,29	0,33	0,37	0,21	0,25	0,29	0,33	0,37	100,00	100,00
4	Persentase Kabupaten Layak Anak	0	0	61	71	81	91	100	61	71	81	91	100	100,00	100,00
5	Predikat akuntabilitas DP3A	0	0	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	100,00	100,00

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di atas dan peran Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara dalam di Kabupaten Kutai Kartanegara dan dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Belum Optimalnya Anggaran Responsif Gender di masing-masing Perangkat Daerah
2. Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum didampingi seluruhnya oleh tenaga terlatih
3. Belum semua terpenuhinya pelayanan penanganan kasus sesuai dengan SPM
4. belum optimalnya Para pengambil kebijakan belum banyak membuat kebijakan yang responsif anak
5. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap hak-hak anak
6. Kelembagaan PUG di OPD belum Optimal
7. Kurangnya perempuan sebagai pelaku ekonomi yang mendapat Pembinaan

Dari permasalahan diatas Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara guna mewujudkan pencapaian tujuan masyarakat Kutai Kartanegara secara bersama yang intinya adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Oleh karena itu maka peran perempuan Kutai Kartanegara dalam bidang Ekonomi Pendidikan dan Kesehatan harus terus ditingkatkan.

Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Dinas Koordinatif dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memiliki beberapa program terkait dengan rencana tata ruang wilayah. Program tersebut adalah Program Keserasian Kebijakan Kualitas Perempuan dan anak dalam kegiatan Fasilitasi Kabupaten Layak Anak, RAD KLA Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut sesuai amanah peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak. Juga memperhatikan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 thn 2010 tanggal 26 juli 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjuk sebagai 10 Kabupaten / Kota Pengembang Kota / Kabupaten Kota Layak Anak. Berkenaan dengan hal diatas

dapat diidentifikasi Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam rancangan program pembangunan menuju Kabupaten Layak Anak (KLA). KLA adalah Pembangunan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu sistem Pembangunan Berbasis Pemenuhan Hak Anak melalui Pengintegrasian Komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Pembangunan berbasis pada perwujudan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak secara tidak langsung akan memenuhi kebutuhan penataan ruang sebuah lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD:

- Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
- Jumlah Pojok ASI yang memadai dan layak, di tempat umum (Bandara, pusat perbelanjaan, terminal dll) tempat kerja;
- Ketersediaan Rumah Tangga dengan akses air bersih;
- Ketersediaan Kawasan tanpa asap rokok;
- Tersedianya sekolah yang ramah Anak;
- Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
- Tersedianya sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak diluar sekolah dan dapat diakses semua anak;
- Tersedianya lembaga perlindungan anak bermasalah dengan hukum; dan
- Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan keperluan anak.

Untuk menanggulangi permasalahan dan isu-isu diatas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan salah satunya adalah melalui :

1. Program Perlindungan Perempuan dengan Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 jumlah penduduk perempuan)
2. Program Perlindungan Anak dengan indikator Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan Indikator Persentase Kabupaten Layak Anak
6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Indikator Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 – 2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA- PPAS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada perubahan dalam sasaran strategis dimana pada awal perencanaan Renstra terdapat dua (2) sasaran, setelah dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026 sudah disahkan sehingga ada perubahan sasaran strategis pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dilihat dibawah ini :

SEBELUM		SESUDAH	
Sasaran Strategis	Indikator Kineja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan anak	Persentase ARG dalam APBD	Meningkatnya Partisipasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta Penguatan Perlindungan Perempuan dan anak	IDG
	Kabupaten Layak Anak (KLA)		Ratio KDRT

SEBELUM		SESUDAH	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak		

**Tabel 2.4 tentang
Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**

No	Rancangan awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Sat	Targ et	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Sat	Targ et	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	11	10	12	13	14	15
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat akuntabilitas DP3A			100	6.877.459.549		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat akuntabilitas DP3A			100	6.900.000.000	Sekretaris DP3A
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA				175.000.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA				175.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	3	100.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	3	100.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	4	75.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	4	75.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen			71,42	5.626.010.749		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen			71,42	5.628.551.200	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kutai Kartanegara	Bulan	12	5.507.051.549		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kutai Kartanegara	Bulan	12	5.509.592.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	4	118.959.200		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	4	118.959.200	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				47.844.800		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				47.844.800	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	4	47.844.800		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	4	47.844.800	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian				70.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian				70.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah anggota tim	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	20	70.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah anggota tim	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	20	70.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum				289.500.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum				289.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	20	60.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	20	60.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	12	5.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	12	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan	Kab.Kutai Kartanegara	Cetakan dan Penggandaan	1000	8.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan	Kab.Kutai Kartanegara	Cetakan dan Penggandaan	1000	8.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Kab.Kutai Kartanegara	Exemplar	2112	9.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Kab.Kutai Kartanegara	Exemplar	2112	9.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makan minum	Kab.Kutai Kartanegara	Bulan	12	50.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makan minum	Kab.Kutai Kartanegara	Bulan	12	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur	Kab.Kutai Kartanegara	Aparatur	53	117.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur	Kab.Kutai Kartanegara	Aparatur	53	117.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket penataan arsip	Kab.Kutai Kartanegara	Paket	1	40.000.000		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket penataan arsip	Kab.Kutai Kartanegara	Paket	1	40.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah				79.674.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah				79.674.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	6	79.674.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	6	79.674.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				494.430.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				514.430.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi dan informasi	Kab.Kutai Kartanegara	Bulan	12	75.040.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi dan informasi	Kab.Kutai Kartanegara	Bulan	12	75.040.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	35	40.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	35	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	19	379.390.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	19	399.390.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				95.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				95.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	25	72.964.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	25	72.964.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	3	22.036.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	3	22.036.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 jumlah penduduk perempuan)			0,015	750.000.000		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 jumlah penduduk perempuan)			0,015	450.000.000	Bidang PHPPKA

	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi			20	200.000.000		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi			20	100.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	Organisasi	3	100.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	Organisasi	3		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	1	100.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	1	100.000.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani			100	200.000.000		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani			100	175.000.000	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	3	100.000.000		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	3	75.000.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/ kota	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	3	100.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/ kota	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	3	100.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga layanan Perempuan yang mendapat pelatihan			10	350.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga layanan Perempuan yang mendapat pelatihan			10	175.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan yang Memerlukan Perlindungan	Kab.Kutai Kartanegara	Sarana	3	100.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan yang Memerlukan Perlindungan	Kab.Kutai Kartanegara	Sarana	3	100.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	6	100.000.000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	6		
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Kondisi Khusus	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	26	50.000.000		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Kondisi Khusus	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	26		

	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/ kota yang sudah dilatih	Kab.Kutai Kartanegara	Kader	30	100.000.000		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/ kota yang sudah dilatih	Kab.Kutai Kartanegara	Kader	30	75.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten			0,21	1.450.000.000		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten			0,21	575.000.000	Bidang PHPPKA
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap Anak			8,13	400.000.000		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap Anak			8,13	100.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	20	200.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	20		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Sosialisasi sosial anak	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	500	200.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Sosialisasi sosial anak	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	500	100.000.000	

	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani			100	500.000.000		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani			100	275.000.000	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat yang dilayani	Kab.Kutai Kartanegara	Korban	100	150.000.000		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat yang dilayani	Kab.Kutai Kartanegara	Korban	100	150.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Korban Kekerasan terhadap anak	Kab.Kutai Kartanegara	Korban	100	150.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Korban Kekerasan terhadap anak	Kab.Kutai Kartanegara	Korban	100		
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Kab.Kutai Kartanegara	KIE	50	100.000.000		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Kab.Kutai Kartanegara	KIE	50		
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang bekerja sama dalam penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan Khusus	Kab.Kutai Kartanegara	OPD	20	100000000		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang bekerja sama dalam penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan Khusus	Kab.Kutai Kartanegara	OPD	20	125.000.000	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan			24,90	550.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan			24,90	200.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kab.Kutai Kartanegara	Sarana	15	150.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kab.Kutai Kartanegara	Sarana	15		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Aktifis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM)	Kab.Kutai Kartanegara	Peserta	62	200.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Aktifis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM)	Kab.Kutai Kartanegara	Peserta	62	100.000.000	Kepala Bidang KHPK2DI.....
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan kelompok Program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	Kab.Kutai Kartanegara	Peserta	30	200.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan kelompok Program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	Kab.Kutai Kartanegara	Peserta	30	100.000.000	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			25,50	3.300.000.000		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			25,50	825.000.000	Bidang KHPK2DI

	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang telah dilatih PUG			33,47	1.200.000.000		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang telah dilatih PUG			33,47	225.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab.Kutai Kartanegara	OPD	49	300.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab.Kutai Kartanegara	OPD	49	100.000.000	Kasubbid. ...
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	Kab.Kutai Kartanegara	OPD	49	300.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	Kab.Kutai Kartanegara	OPD	49		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab.Kutai Kartanegara	Desa	49	300.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab.Kutai Kartanegara	Desa	49		
49	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	49	300.000.000		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	49	125.000.000	

50	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan			11,07	1.050.000.000		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan			11,07	450.000.000	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	Perempuan	78	300.000.000		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	Perempuan	78	100.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	Perempuan	100	750.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	Perempuan	100	350.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Persentase lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan			10,87	1.050.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Persentase lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan			10,87	150.000.000	
V	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	46	350.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	46		

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya .	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	46	350.000.000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya .	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	46	150.000.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) .	Kab.Kutai Kartanegara	KIE	46	350.000.000		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) .	Kab.Kutai Kartanegara	KIE	46		
VI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten			28,85	500.000.000		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten			28,85	200.000.000	Bidang KHPK2DI
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data Pilah Gender dan Anak			28,85	500.000.000		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data Pilah Gender dan Anak			28,85	200.000.000	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pilah Gender dan Anak yang tersedia pada Perangkat Daerah.	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	12	250.000.000		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pilah Gender dan Anak yang tersedia pada Perangkat Daerah.	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	12	100.000.000	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pilah Gender dan Anak yang disajikan dan dimanfaatkan.	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	12	250.000.000		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pilah Gender dan Anak yang disajikan dan dimanfaatkan.	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	12	100.000.000	

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten Layak Anak			61%	900.000.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten Layak Anak			61%	600.000.000	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemenuhan hak anak yang terbentuk			19,44	200.000.000	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemenuhan hak anak yang terbentuk			19,44	200.000.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga pemerintah / non pemerintah yang di advokasi	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	5	100.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga pemerintah / non pemerintah yang di advokasi	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	5	100.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	Anak	3	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	Anak	3	100.000.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan layak Anak			44,44	700.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan layak Anak			44,44	400.000.000	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak Tk Daerah Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Anak	2	100.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak Tk Daerah Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Anak	2	100.000.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang menginisiasi Kecamatan Layak Anak	Kab.Kutai Kartanegara	Kecamatan	2	200.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang menginisiasi Kecamatan Layak Anak	Kab.Kutai Kartanegara	Kecamatan	2	200.000.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa)	Kab.Kutai Kartanegara	KIE	3	100.000.000		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa)	Kab.Kutai Kartanegara	KIE	3	100.000.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	58	300.000.000		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	58		
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak				1.100.000.000		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak				450.000.000	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak			25,00	350.000.000		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak			25,00	100.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak yang sudah diterapkan	Kab.Kutai Kartanegara	Peraturan	3	100.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak yang sudah diterapkan	Kab.Kutai Kartanegara	Peraturan	3		

	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa)	Kab.Kutai Kartanegara	KIE	3	100.000.000		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa)	Kab.Kutai Kartanegara	KIE	3	100.000.000	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Masyarakat yang mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kualitas keluarga	Kab.Kutai Kartanegara	Masyarakat	3	150.000.000		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Masyarakat yang mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kualitas keluarga	Kab.Kutai Kartanegara	Masyarakat	3		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang melaksanakan kebijakan dalam mewujudkan KG dan Hak Anak			16,67	600.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang melaksanakan kebijakan dalam mewujudkan KG dan Hak Anak			16,67	200.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan dan pendampingan untuk pengembangan lembaga penyedia layanan Kualitas Keluarga yang sudah dievaluasi	Kab.Kutai Kartanegara	Keluarga	1	100.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan dan pendampingan untuk pengembangan lembaga penyedia layanan Kualitas Keluarga yang sudah dievaluasi	Kab.Kutai Kartanegara	Keluarga	1		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang terlatih pada lembaga penyedia layanan	Kab.Kutai Kartanegara	Peserta	1	250.000.000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang terlatih pada lembaga penyedia layanan	Kab.Kutai Kartanegara	Peserta	1	100.000.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	Keluarga	1	250.000.000		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	Keluarga	1	100.000.000	

	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Keluarga yang terstandarisasi			20,00	150.000.000		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Keluarga yang terstandarisasi			20,00	150.000.000	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Kab.Kutai Kartanegara	lembaga	1	150.000.000		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Kab.Kutai Kartanegara	lembaga	1	150.000.000	
	JUMLAH					14.877.459.549		JUMLAH					10.000.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) Desa ataupun Musrenbang Kecamatan terdapat usulan dari masyarakat yang berhubungan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dimana di dalam Rapat Forum Perangkat Daerah di masing-masing Perangkat Daerah usulan masyarakat tersebut telah diakomodir oleh OPD diantaranya :

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
1	Masih banyaknya warga yang belum memiliki buku nikah yang sah dari KUA	Desa Sambera baru Kab.Kukar Marang kayu Sambera Baru		Menyesuaikan dengan kegiatan DP3A
2	Kurangnya edukasi tentang rumah tangga	RT. 16 Dusun karang Rejo Kab.Kukar Tgr seberang, Bangun Rejo		Menyesuaikan dengan kegiatan DP3A
3	Sosialisasi mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelurahan	Kantor Lurah Loa Ipuh Kab.Kukar Tenggarong		Menyesuaikan dengan kegiatan DP3A

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Melalui Strategi Nasional (STRANAS) Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender (PPRG), berdasarkan permasalahan, sasaran, serta arah Kebijakan Nasional, maka strategi PPRG meliputi strategi umum dan strategi khusus. Strategi umum mengacu pada dua permasalahan yang dihadapi adalah penerapan PPRG di tingkat Nasional dan daerah yaitu :

- a. Penguatan Dasar Hukum
- b. Penguatan koordinasi baik antar sesama Instansi Penggerak maupun antar Penggerak dengan Instansi Pelaksana.

Strategi khusus berupa penjabaran dari strategi umum yaitu penguatan koordinasi melalui serangkaian strategi khusus yang diklasifikasikan menurut tahapan manajemen pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi.

Belum efektifnya kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan antara lain dapat dilihat :

- 1) Belum optimalnya dukungan politik terhadap Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Prioritas Pembangunan
- 2) Belum memadainya kelembagaan dalam pelaksanaan PUG terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.
- 3) Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep Isu Gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.

Masalah lainnya adalah belum tersedianya data terpilah sehingga sulit dalam menemu-kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan.

Lambatnya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesenjangan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik serta pengambilan keputusan yang signifikan yang antara lain disebabkan oleh :

- (1) Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran Kabupaten/Kota,
- (2) Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang Politik, Jabatan Publik dan di Bidang Ekonomi,
- (3) Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit.
- (4) Penyusunan data terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / OPD, belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit dalam menemu-kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi

masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pentingnya data terpilah, mengidentifikasi masalah dan dapat dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial, ekonomi, waktu, yang dalam analisisnya menggunakan Analisa Gender. Bentuk data terpilah bisa kuantitatif atau kualitatif, dari data terpilah dapat diketahui posisi dan kondisi kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan dan permasalahannya dengan mengurangi kesenjangan gender :

- ❖ Pemetaan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan;
- ❖ Dapat lebih mudah menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan sekaligus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam *Gender Budget Statement (GBS)*;
- ❖ Akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi, karena data terpilah dan perencanaan serta analisa gendernya jika sudah tersedia, akan mudah membandingkannya dengan kondisi setelah diintervensi.

Tantangan dan permasalahan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semakin bertambah berat dan kompleks. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat yang dapat menjadi penghalang pencapaian tujuan atau sasaran. Diperlukan kerja keras dan upaya yang serius agar target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Berikut ini akan diuraikan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DINAS PP & PA ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun RENSTRA DINAS PP & PA Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu berfokus pada upaya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan yang Responsif Gender di Bidang Ekonomi, Politik, Sosial dan Keamanan, kemudian memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta memperhatikan tumbuh kembang anak.

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian sasaran di atas antara lain :

- a. Diskriminasi dari pemberi pekerjaan terhadap tenaga kerja perempuan;
- b. Tingkat kompetitif perempuan yang rendah ;
- c. Kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait/ stakeholder mengenai PUG;
- d. Rendahnya tingkat pendidikan;
- e. Kurangnya akses pendidikan bagi perempuan;
- f. Kurangnya kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan;
- g. Belum adanya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- h. Budaya *patriarckhi* di masyarakat;
- i. Kurangnya komitmen kepala daerah dan sinergitas lintas sektor;
- j. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS pemerhati perempuan dan anak;

- k. Kebijakan daerah belum *responsive gender*;
- l. Data Terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / SKPD; dan
- m. Belum didukung oleh kualitas dan kuantitas tenaga yang handal.

Namun demikian terdapat kondisi yang merupakan faktor pendorong pelayanan Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran tersebut. Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah:

- a) Masih terbukanya kesempatan kerja yang luas;
- b) Telah adanya regulasi yang *responsive gender*;
- c) Telah adanya program pengentasan kemiskinan;
- d) Telah adanya Komitmen Kepala Daerah mengenai PUG;
- e) Telah adanya Regulasi terkait Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f) Telah adanya Komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi tentang KLA;

Di Bidang Partisipasi Anak telah diterbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak, dan 2 (dua) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Forum Anak, sampai dengan Tahun 2016 terbentuk FORUM Anak di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa se Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu bentuk wadah partisipasi anak. Partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik ditingkat Nasional maupun di daerah. Di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara sejak Tahun 2013 melibatkan Forum Anak dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu Kementerian PPPA juga mengikutsertakan Forum Anak Daerah dalam Konferensi Tingkat Asia yang di laksanakan di Kota Solo, yang membahas tentang partisipasi anak dan Kabupaten / Kota Layak Anak, serta seleksi anak berbakat melalui Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI) di Tingkat Provinsi KALTIM.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belum tertangani dengan baik dikarenakan belum adanya koordinasi yang baik antara lintas OPD sehingga mempersulit penanganannya terutama yang ada di wilayah kecamatan, dan terbatasnya pengetahuan orang tua/keluarga yang memiliki ABK terhadap anaknya sehingga malu dan menyembunyikan/menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Disamping itu jumlah guru disekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas, sehingga banyak tidak dapat bersekolah di sekolah umum Inklusi. Data ABK dari SLB tahun 2014 berjumlah 111 orang dan di tahun 2015 berjumlah 125 Orang. Ini menunjukkan anak penyandang disabilitas dari seluruh anak di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun meningkat.

Permasalahan sosial anak mencakup area yg cukup luas dan merupakan isu lintas sektoral, antara lain yang mengalami eksploitasi secara ekonomi (pekerja anak). Anak korban penyalahgunaan narkoba yang dibina dikalapas KelasII B Tenggarong pada tahun 2014 berjumlah 22 orang dan tahun 2015 sebanyak 15 orang. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu zat adiktif lainnya diantaranya anak menghisap lem semakin marak dan meresahkan masyarakat hampir disetiap Kecamatan,di Kabupaten Kutai Kartanegara ada anak yang melakukan hal tersebut. Perkawinan usia anak masih

banyak terutama di desa-desa terpencil. Masalah sosial yang dialami oleh anak pada umumnya berasal dari keluarga miskin yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik dan keluarga yang tidak utuh (brokend home).

Capaian pembangunan anak, kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada 3 (tiga) hal yaitu : pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Prinsip – prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah :

- a. Non – Diskriminasi : yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan suku, status ekonomi, kondisi fisik anak, atau faktor lainnya.
- b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu mengupayakan semua keputusan kegiatan dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata mata untuk kepentingan terbaik untuk anak.
- c. Mengutamakan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya.
- d. Menghormati pandangan anak ,yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengembalian keputusan setiap kegiatan.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya. Pemenuhan hak identitas anak dapat dilihat dari meningkatnya cakupan akte kelahiran anak usia 0 – 18 tahun se Kabupaten Kutai Kartanegara dari 266,443 orang yang didata sampai dengan bulan bulan September 2019 = 163, 875, terdata 61.50 % (data dari DISDUKCAPIL) yang sudah terlayani dan mendapatkan akte kelahiran.

Upaya percepatan pemilikan akte kelahiran dilakukan melalui penetapan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada 24 Desember 2013. MoU delapan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran.

Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABDH) dengan diterapkannya undang-undang no 11 tahun 2012 tentang peradilan anak maka anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan rehabilitasi (anak ini diberikan hak-haknya terutama untuk memperoleh pendidikan walaupun berhadapan dengan hukum).

Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjuk langsung oleh Presiden RI melalui Kementerian PP PA RI pada Tahun 2006 bersama 4 (empat) Kabupaten/Kota menjadi KABUPATEN MENUJU KOTA LAYAK ANAK (Sidoarjo, Gorontalo, Jambi, Solo, dan Kutai Kartanegara) dengan Pendukung PERDA NO 9 Tahun 2004 Tentang ZONA BEBAS PEKERJA ANAK. Pada Tahun 2013 Presiden RI melalui Kementerian PP PA menunjuk Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu dari 5 Kabupaten / Kota di Indonesia untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI nomor 56 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penunjukan & Penetapan Kabupaten/Kota Yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak bersama 5 daerah Kabupaten /Kota lainnya menganugerahkan KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA sebagai KABUPATEN KOTA LAYAK ANAK di Tingkat PRATAMA dari 37 Kabupaten/Kota se Indonesia. Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, di pandang perlu adanya :

1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 334/ SK – Bup/ HK/ 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Pengembangan Layak Anak (KLA).
2. Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 1 Tahun 2012 tentang pengembangan Program dan Anggaran terhadap percepatan Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) bagi setiap OPD sesuai dengan Indikator dan Tupoksi OPD Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 2 Tahun 2012 tentang PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KECAMATAN DAN KELURAHAN / DESA Pembentukan
4. Bahkan Anak berhadapan dengan hukum harus melanjutkan sekolah dari tingkat SD / SLTP / MTS / Pesantren / SLTA / dan Perguruan Tinggi di fasilitasi oleh TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH SOSIAL PEREMPUAN DAN ANAK DI TK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. Dalam rangka memenuhi hak dan melindungi anak di lembaga pendidikan, pada tahun 2014 KEMEN PPPA menggagas tersusunya Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) bersama 9 (Sembilan) K / L terkait (Kementerian PPPA RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, dan BPOM), lembaga masyarakat, lembaga Internasional, lembaga pemerhati anak dan pakar anak.

Kabupaten/kota layak anak adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak & perlindungan anak. Alasan mengapa Kabupaten/Kota Layak Anak perlu dilaksanakan karena:

- Anak adalah amanah Tuhan yang perlu dipertanggungjawabkan secara pribadi dan sosial;
- Jumlah anak 30 - 36% dari total penduduk , tidak bisa diabaikan;
- Perubahan global mengancam tata nilai agama, sosial, dan budaya lokal;
- Embrio SDM yang handal dan tangguh menentukan masa depan bangsa dan negara; dan
- Anak terancam menjadi korban kekerasan, pelecehan, dikriminasi, perlakuan salah.

Pengembangan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak yang belum menyeluruh, yang mana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 telah mendapat penghargaan pada tingkat Pratama dengan adanya penghargaan ini diharapkan kepada seluruh SKPD terkait untuk dapat mengintegrasikan kedalam program SKPD masing-masing sesuai dengan tupoksinya.

Di Bidang Pemenuhan hak Kesehatan Anak, Kementerian PPPA RI bersama tiga Kementerian terkait (Kementerian PPPA RI, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri) telah mendorong terbentuknya Puskesmas Ramah Anak (PRA) dalam rangka mengurangi kesakitan pada anak sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 1 PUSKEMAS yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak yaitu Puskesmas Rapak Mahang. Upaya pemenuhan hak kesehatan anak lainnya seperti penurunan angka kematian bayi (ABK) di bulan Januari s/d Agustus Tahun 2016 berjumlah 90 Orang dan Angka Kematian Bayi dan Anak (AKBK), hasil survey PSG balita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 status Kekurangan GIZI 22,67% se Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan ketersediaan air bersih Tahun 2015 daerah perkotaan sebanyak 80% dan daerah pedesaan 60 % dari jumlah penduduk Kutai Kartanegara.

Di bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, telah dilakukan beberapa upaya seperti mendorong tersedianya Rute Aman Sekolah ke / dari Sekolah (RASS) terkait (DPPA,Perhubungan,Ciptakarya, Dikbud, Kementerian Agama dan POLRES KUKAR) selain itu juga dilakukan sosialisasi, KIE, dan pelatihan kepada FORUM ANAK di Tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan dalam upaya penanaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air . Dalam upaya mendukung penciptaan infrastruktur yang ramah anak juga telah diinisiasi Penyusunan Rancangan Kebijakan Ruang BERMAIN RAMAH ANAK. Dalam rangka Meningkatkan peran PERLINDUNGAN ANAK, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan PERDA NO 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dapat dijadikan acuan bagi PEMDA dalam mendorong peningkatan partisipasi dan kualitas hidup anak di segala bidang dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi Misi Pemerintah Daerah.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas PP dan PA dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.

3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dinas PP & PA Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pelayanan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya faktor penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No.	Visi	Misi	Masalah	Akar Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Program
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak	Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum memiliki pendamping korban tingkat kecamatan/desa	Membentuk kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
			dan belum didampingi seluruhnya oleh tenaga terlatih	Kurangnya pemahaman masyarakat dampak dari kekerasan pada perempuan dan anak	Memberikan pemahaman ke masyarakat tentang kekerasan dan dampak dari kekerasan pada perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

No.	Visi	Misi	Masalah	Akar Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Program
1	2	3	4	5	6	7
			Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap hak-hak anak	Para pengambil kebijakan belum banyak membuat kebijakan yang responsif anak	Mendorong stakeholder untuk responsif terhadap pemenuhan hak anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
						Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
						Program Pemenuhan Hak-Hak Anak
			Kelembagaan PUG di OPD belum Optimal	Masih Banyak ASN yang Belum Memahami Tentang PUG	Fasilitasi dan advokasi kepada OPD beserta seluruh ASN didalamnya untuk implementasi PUG	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Rendahnya Angka IPG dan IDG	Belum Optimalnya OPD yang terkait Dengan IPG dan IDG	Sinkronisasi dan Penguatan Indikator Variabel IPG dan IDG oleh Masing Masing OPD Terkait	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender (KKG) secara maksimal	Rendahnya Pratisipasi terhadap Pembangunan Kesetaraan Gender	Mempercepat Implementasi PUG dan Memperkuat Peran Perempuan dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
			Implementasi Kebijakan masih belum Optimal	Konsistensi terhadap pelaksanaan kebijakan masih kurang	Memperkuat dan Mempertajam pelaksanaan kebijakan terhadap peran, kedudukan dan fungsi pemberdayaan pp dan anak	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
			Kurangnya perempuan sebagai pelaku ekonomi	Akses pp dalam mendapatkan informasi usaha masih sulit.2.Kurangny a permodalan usaha.3.Rendahn ya kualitas SDM	Memberikan akses Informasi dan kesempatan seluas luasnya bagi perempuan untuk memperoleh bantuan modal serta memberikan bimbingan manajemen usaha	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka kegiatan pada Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan dan rencana pagu dana. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun 2021 adalah sebanyak 69 Kegiatan dan 10 Program.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Renstra Kementerian dan Provinsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada perubahan terhadap indikator program :

No	Program/Pembangunan	Indikator	Cara Hitung
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Jabatan	Jumlah keterwakilan perempuan dalam jabatan dibagi jumlah jabatan dikali 100
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	Jumlah PD yang memiliki data gender dibagi jumlah PD dikali 100
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Perempuan mengalami kekerasan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan x100

No	Program/Pembangunan	Indikator	Cara Hitung
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Anak (Penduduk Usia Kurang dari 18 Tahun korban kekerasan yang ditangani Instansi tingkat Ka/Kota yang didampingi dibagi jumlah Anak (Penduduk Usia Kurang dari 18 Tahun) x 100%
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten Layak Anak	Jumlah kecamatan yang menginisiasi KLA dibagi dengan jumlah kecamatan x 100
6.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	

c. Rumusan Program dan Kegiatan tidak Sesuai dengan Rancangan awal

Dalam melakukan perumusan Program dan kegiatan sejauh ini masih sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, Akan tetapi dari penetapan pagu Indikatif terdapat ada beberapa perubahan dalam penyusunan renja Tahun 2022.

d. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Penanggung Jawab
			Lokasi	Satuan	T	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif	Sumber Dana		T	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat akuntabilitas DP3A			77	6.900.000.000	APBD		77	7.169.786.349	Sekretaris DP3A
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA				175.000.000	APBD			175.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	3	100.000.000	APBD		3	100.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	4	75.000.000	APBD		4	75.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen			71,42	5.628.551.200	APBD		71,42	5.632.051.549	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kutai Kartanegara	Bulan	12	5.509.592.000	APBD		12	5.507.051.549	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	4	118.959.200	APBD		4	125.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				47.844.800	APBD			47.844.800	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	4	47.844.800	APBD		4	47.844.800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian				70.000.000	APBD			70.000.000	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah anggota tim	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	20	70.000.000	APBD		20	70.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum				289.500.000	APBD			410.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	20	60.000.000	APBD		20	60.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	12	5.000.000	APBD		12	8.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan	Kab.Kutai Kartanegara	Cetakan dan Penggandaan	1000	8.500.000	APBD		1000	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Kab.Kutai Kartanegara	Exemplar	2112	9.000.000	APBD		2112	12.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makan minum	Kab.Kutai Kartanegara	Bulan	12	50.000.000	APBD		12	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur	Kab.Kutai Kartanegara	Aparatur	53	117.000.000	APBD		53	200.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket penataan arsip	Kab.Kutai Kartanegara	Paket	1	40.000.000	APBD		1	65.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah				79.674.000	APBD			150.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	6	79.674.000	APBD		6	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				514.430.000	APBD			549.390.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi dan informasi	Kab.Kutai Kartanegara	Bulan	12	75.040.000	APBD		12	85.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	35	40.000.000	APBD		35	65.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	19	399.390.000	APBD		19	399.390.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				95.000.000	APBD			135.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	25	72.964.000	APBD		25	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kab.Kutai Kartanegara	Unit	3	22.036.000	APBD		3	35.000.000	
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 jumlah penduduk perempuan)			0,015	450.000.000	APBD		0,015	750.000.000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi			20	100.000.000	APBD		20	200.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	Organisasi	3		APBD		3	100.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	1	100.000.000	APBD		1	100.000.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan Perempuan yang terlayani			100	175.000.000	APBD		100	200.000.000	

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	3	75.000.000	APBD		3	100.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/ kota	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	3	100.000.000	APBD		3	100.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga layanan Perempuan yang mendapat pelatihan			10	175.000.000	APBD		10	350.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan yang Memerlukan Perlindungan	Kab.Kutai Kartanegara	Sarana	3	100.000.000	APBD		3	100.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	6		APBD		6	100.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Kondisi Khusus	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	26		APBD		26	50.000.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/ kota yang sudah dilatih	Kab.Kutai Kartanegara	Kader	30	75.000.000	APBD		30	100.000.000	
III	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten			0,21	575.000.000	APBD		0,21	1.450.000.000	

	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap Anak			8,13	100.000.000	APBD		8,13	400.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	20		APBD		20	200.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Sosialisasi sosial anak	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	500	100.000.000	APBD		500	200.000.000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani			100	275.000.000	APBD		100	500.000.000	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat yang dilayani	Kab.Kutai Kartanegara	Korban	100	150.000.000	APBD		100	150.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Korban Kekerasan terhadap anak	Kab.Kutai Kartanegara	Korban	100		APBD		100	150.000.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Kab.Kutai Kartanegara	KIE	50		APBD		50	100.000.000	

	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang bekerja sama dalam penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan Khusus	Kab.Kutai Kartanegara	OPD	20	125.000.000	APBD	Keg.Baru	20	100000000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan			24,90	200.000.000	APBD		24,90	550.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kab.Kutai Kartanegara	Sarana	15		APBD		15	150.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM)	Kab.Kutai Kartanegara	Peserta	62	100.000.000	APBD		62	200.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan kelompok Program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	Kab.Kutai Kartanegara	Peserta	30	100.000.000	APBD		30	200.000.000	
IV	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			25,50	825.000.000	APBD		25,50	3.300.000.000	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang telah dilatih PUG			33,47	225.000.000	APBD		33,47	1.200.000.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab.Kutai Kartanegara	OPD	49	100.000.000	APBD		49	300.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	Kab.Kutai Kartanegara	OPD	49		APBD		49	300.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab.Kutai Kartanegara	Desa	49		APBD		49	300.000.000	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga Pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	49	125.000.000	APBD		49	300.000.000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi masyarakat yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan			11,07	450.000.000	APBD		11,07	1.050.000.000	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	Perempuan	78	100.000.000	APBD		78	300.000.000	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	Perempuan	100	350.000.000	APBD		100	750.000.000	Bidang KHPKKDI
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Persentase lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan			10,87	150.000.000	APBD		10,87	1.050.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	46		APBD		46	350.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya .	Kab.Kutai Kartanegara	Orang	46	150.000.000	APBD		46	350.000.000	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) .	Kab.Kutai Kartanegara	KIE	46		APBD		46	350.000.000	
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten			28,85	200.000.000	APBD		28,85	500.000.000	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data Pilah Gender dan Anak			28,85	200.000.000	APBD		28,85	500.000.000	

	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pilah Gender dan Anak yang tersedia pada Perangkat Daerah.	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	12	100.000.000	APBD		12	250.000.000	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pilah Gender dan Anak yang disajikan dan dimanfaatkan.	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen	12	100.000.000	APBD		12	250.000.000	
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten Layak Anak			61%	600.000.000	APBD		61%	925.000.000	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemenuhan hak anak yang terbentuk			19,44	200.000.000	APBD		19,44	200.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga pemerintah / non pemerintah yang di advokasi	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	5	100.000.000	APBD		5	100.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	Anak	3	100.000.000	APBD		3	100.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan layak Anak			44,44	400.000.000	APBD		44,44	725.000.000	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak Tk Daerah Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Anak	2	100.000.000	APBD		2	125.000.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang menginisiasi Kecamatan Layak Anak	Kab.Kutai Kartanegara	Kecamatan	2	200.000.000	APBD		2	200.000.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa)	Kab.Kutai Kartanegara	KIE	3	100.000.000	APBD		3	100.000.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Kab.Kutai Kartanegara	Lembaga	58		APBD		58	300.000.000	
VII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak				450.000.000	APBD			1.275.000.000	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak			25,00	100.000.000	APBD		25,00	475.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak yang sudah diterapkan	Kab.Kutai Kartanegara	Peraturan	3		APBD		3	150.000.000	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa)	Kab.Kutai Kartanegara	KIE	3	100.000.000	APBD		3	125.000.000	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Masyarakat yang mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kualitas keluarga	Kab.Kutai Kartanegara	Masyarakat	3		APBD		3	200.000.000	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang melaksanakan kebijakan dalam mewujudkan KG dan Hak Anak			16,67	200.000.000	APBD		16,67	650.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan dan pendampingan untuk pengembangan lembaga penyedia layanan Kualitas Keluarga yang sudah dievaluasi	Kab.Kutai Kartanegara	Keluarga	1		APBD		1	150.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang terlatih pada lembaga penyedia layanan	Kab.Kutai Kartanegara	Peserta	1	100.000.000	APBD		1	250.000.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	Keluarga	1	100.000.000	APBD		1	250.000.000	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Keluarga yang terstandarisasi			20,00	150.000.000	APBD		20,00	150.000.000	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Kab.Kutai Kartanegara	lembaga	1	150.000.000	APBD		1	150.000.000	
	J U M L A H						10.000.000.000			15.369.786.349	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022. Proses penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah.

a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum memadai terutama untuk keperluan printer dan komputer yang sudah banyak mengalami rusak berat.
2. Keadaan kantor yang masih belum representatif untuk menyelenggarakan organisasi dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya ruangan untuk menangani kekerasan perempuan dan anak serta keperluan ruang arsip dan ruang barang rusak.
3. Ketiadaan sumber daya aparatur yang khusus untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan dari segi psikologis menjadikan kendala bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi.
4. Banyak lokasi korban kekerasan pada perempuan dan anak yang memerlukan biaya besar untuk dijangkau.

b) Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak disesuaikan dengan adanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditunjuk langsung oleh Presiden RI melalui Kementerian PP PA RI pada Tahun 2006 bersama empat kabupaten/kota menjadi kabupaten menuju Kabupaten Layak Anak (Sidoarjo, Gorontalo, Jambi, Solo, dan Kutai Kartanegara) diperkuat dengan Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kecamatan dan Kelurahan/ Desa. Dalam menentukan arah jalannya organisasi salah satunya adalah Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c) Rencana Tindak Lanjut.

- ✓ Mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendirian aktifis Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap kecamatan dan di setiap desa ataupun kelurahan.
- ✓ Mendorong upaya pembinaan pelaku usaha perempuan dalam rangka meningkatkan perekonomian perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- ✓ Mendorong OPD Baik OPD di Kabupaten maupun OPD kecamatan untuk menginisiasi Kecamatan Layak Anak

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 22 Maret 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Kutai Kartanegara



Hj. Aji Lina Rodiah, SE
NIP. 19650325 198503 2 010

